

Scientific blog,.

## **INDUSTRI PERS DAN REALITAS**

Oleh: A. Nurdjaman, Penulis™ atau Writer™

Alamat: di belakang

Pers sebagai tulang punggung dari news terarah dan terkontrol sebagai front office dari keanekaragaman pendapat diketengahkan dan ditampilkan sebagai suatu bentuk news yang terstruktur dan juga terorganisir sebagai suatu bentuk komunikasi antara pembuat berita dan juga pendengar dan pembaca serta penikmat gosip.

Pers dijadikan tulang-punggung bagi masyarakat sekarang sebagai bentuk komunikasi antara yang mempunyai maksud dan tujuan dengan seseorang yang menginginkan berita apapun perihal orang lain yang tentunya tidak didasarkan atas interest semata atau dikarenakan didasarkan atas keinginan untuk tahu saja. Ketahuan akan suatu berita atau news identik dengan pengetahuan yang akan diperoleh seseorang dan menjadi mahfum dengan keadaan orang lain dan menjadi sesuatu yang agresif untuk diperbincangkan dan didiskusikan dan menjadi sesuatu yang ada manfaatnya apabila selalu diambil sebagai bentuk informasi komunikasi yang positif. Berita jelek menjadi positif apabila yang mendengarkan adalah yang mengerti bahwa berita tersebut adalah jelek ditinjau dari isi atau kontens dan juga dari maksud dan tujuannya dibuat berita tersebut, yang akhirnya menjadi bermanfaat ketika seseorang tersebut sadar bahwa berita tersebut tidak benar dan akhirnya timbul opini terbalik yaitu interes untuk tidak mengedepankan berita tersebut sebagai bagian diskusi di dalam diri kita dan tidak menyebarkan berita tidak benar atau berita bohong tersebut. Menjadi bernilai seseorang apabila berlaku dan bertindak seperti tersebut.

Apabila seseorang mendapatkan informasi komunikasi lewat suatu berita atau news tentunya akan membuat terciptanya suasana nuansa yang berisi kekayaan informasi yang bermanfaat bagi seseorang sebagai suatu kebutuhan akan penerang jalan di dalam melangkah di dunia luar sana yang berdiri kokoh angkuh menggapai nuansa ke-dirian bahwa kamilah yang terunggul, makanya berita tersebut dibuat. Kita sebagai pendengar atau pembaca berita menjadi gamang ketika melihat berita-berita di tv atau di radio menjadi menu utama untuk dikedepankan seolah-olah hanya itu yang terjadi di dunia luar sana, hanya itulah yang membuat dunia ini berputar. Adalah tidak benar apabila kita menganggap hal yang demikian. Berita menjadi menarik apabila kita mengetahui seluk beluk berita sesuai dengan background yang kita miliki, dan background yang dimiliki tersebut menentukan keputusan untuk tetap melihat berita tersebut atau malah meninggalkan karena menganggap berita tersebut tidak menarik dari sisi perspektif anda. Keminatan akan suatu berita akan menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang. Makin sering seseorang ingin menginginkan berita maka makin tinggi

intelektualitas seseorang tadi, memang belum ada penelitian yang mengungkapkan hal demikian dikarenakan cara pengukuran dan akibatnya yang belum ketahuan bagaimana dan cara untuk melakukannya. Berita membuat seseorang menjadi lebih fokus di dalam berbincang dan berdiskusi, berita membuat seseorang menjadi lebih kenal dengan suatu ilmu tertentu, dan berita menjadikan seseorang menjadi yang terlepas dari dilema suatu masalah. Berita seharusnya berperan demikian di dalam konteks bahwa berita adalah sesuatu yang bermanfaat.

Kenyataan berita adalah suatu hal yang bermata dua tentunya harus diingatkan bahwa dulunya berita memang benar-benar mengungkap suatu cara pengungkapan keadaan yang terjadi di luar jauh sana yang keadaan yang terjadi di luar sana tersebut diketahui oleh kita melalui media yang kita dengar atau kita baca. Berita jujur itu namanya, pada awalnya hal demikian terjadi dan menjadi keseharian, tetapi kemudian menjadi berkembang menjadi berita yang tidak jujur di dalam konteks bahwa suatu berita mengandung tujuan yang bisa dimanfaatkan, dan kemanfaatan tersebut bisa diatur oleh yang membuat berita. Berita adalah hal yang maju dikedepankan sebagai bentuk bahwa sesuatu telah terjadi dan dipaparkan kembali oleh media untuk membuat semua orang mengerti keadaan dan apa yang terjadi di luar daerah dimana seseorang mendengar atau membaca atau melihat berita tersebut.

Berita menjadi dilema setelah berita muncul dan ternyata mengandung informasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan logika berfikir kita. Berita menjadi sesuatu yang gamang untuk ditelaah dan difikirkan sebagai sesuatu yang terarah suksesif menghancurkan ketika berita tidak lagi mendukung kebenaran dan kejujuran. Berita menjadi sesuatu yang dibenci ketika berita ternyata bisa di-set menjadi bahan yang bermanfaat dan powerful di dalam mempengaruhi masyarakat atau menghancurkan nama baik masyarakat.

Berita menjadi sesuatu yang benar kalau diikuti dengan sesuatu yang bermanfaat dan jujur. Berita menjadi tidak benar apabila berita dibuat dan dibikin menjadi berita yang tidak benar dan menghasut dan tentunya tidak jujur. Berita demikian tidak mungkin menjadi berita yang langgeng untuk didiskusikan dan menjadi berita yang junk atau sampah yang tidak perlu dikedepankan atau tidak didiskusikan karena kepentingannya yang sedikit di dalam membuat seseorang menjadi pintar dan menjadi seseorang yang mengetahui hal yang terjadi di luar sana yang bermanfaat bagi sekelompok orang atau banyak yang bermanfaat sebagai pencerahan diri di dalam memaknai hidup dan juga memaknai orang lain ditinjau dari sudut kejujuran dan kebenaran berita yang masuk logika dan pra-logika yang hakiki.

Logika dan pra-logika menjadi penting kalau kita menjadikan sesuatu berita sebagai suatu bahan yang harus dihadapi sebagai bahan yang harus dicerna sebagai bahan untuk diketengahkan di dalam konteks bahwa berita adalah bernilai di dalam nuansa kebenaran dan kejujuran. Kejujuran

adalah segala-galanya di dalam menuangkan suatu berita di dalam suatu media, seharusnya dan itu yang dituntut oleh masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung. Media massa diharapkan oleh masyarakat untuk tidak mengibuli atau membohongi masyarakat dalam konteks bahwa berita harus berdasarkan fakta dan keadaan yang sesungguhnya di dalam artian bahwa berita mempunyai hal yang tidak bisa dibuat menjadi sesuatu yang tidak benar, tetapi dibuat atas nama kebenaran dan kejujuran dan mengedepankan rasa hormat kepada pemirsa, baik pendengar maupun yang melihat, dan juga menghormati orang yang menjadi berita atau mengisi berita tersebut. Adalah tidak benar apabila pengisi berita adalah objek yang bisa dimanipulasi oleh semua insan pers yang mengedepankan oplah atau rating atau tingkatan kepopuleran mass medianya. Masyarakat menilai adanya tujuan lain di dalam melihat mass media yang mempublikasikan suatu berita, saat ini mungkin adalah saat yang tepat bagi saya untuk mempublikasikan hasil tulisan saya karena momentumnya tepat dimana sebentar lagi akan terkuak sedikit demi sedikit berita-berita bohong yang diset oleh mass media dan kelompok-kelompok tertentu yaitu kelompok partai politik, sebentar lagi agenda politik pemilu akan dikedepankan yang tentunya akan ditampilkan di dalam media massa dan tentunya akan membuat berita politik itu menjadi menarik kalau diberitakan dengan jujur, dan akan menjadi suatu kebohongan apabila semua berkonspirasi untuk membohongi pemirsa, masyarakat, yang tentunya akan membuahkan hasil berupa keengganan masyarakat untuk menyimak setiap berita politik di media massa, memang mudah bagi pelaku berita dan juga penyampai berita untuk menyiasati keadaan tersebut, dengan hanya mengatakan janganlah dilihat acara berita-berita tersebut, anda tinggal pindahkan channel ke channel yang bukan bukan berita acaranya. Tentunya trik demikian sudah tidak mempan lagi bagi masyarakat, kenapa demikian karena ach tidak mengapa tidak melihat berita anda....karena ada yang lebih enak untuk dilihat atau didengar yaitu film atau sinetron, kalau begitu perang argumen pastinya tidak akan terelakkan, tetapi karena jarak yang berjauhan maka hal demikian pasti terjadi, dan timpang rasanya ketika media massa menseset mengatakan bahwa kami tidak butuh komentar anda. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, kalau kondisi masyarakat sudah apatis, apa yang anda perjuangkan dengan berita bohong?, tentunya jawaban anda adalah.....demi iklan atau pemasangan iklan, saya mendengar rumor bahwa acara berita-berita atau acara news-news di tv-tv atau di radio-radio atau di koran-koran sudah tidak menghasilkan atau memberikan untung bagi perusahaan, banyak pemasangan iklan lari meninggalkan mereka, acara berita-berita atau acara news-news biasanya dibiayai dari iklan di dalam peliputannya, sekarang katanya acara berita-berita atau acara news-news dibiayai dari iklan yang dialokasikan untuk acara sinetron, dari iklan yang dialokasikan untuk acara penayangan film dan dari lainnya. Jelas bahwa acara berita-berita atau acara news-news tidak bisa lagi menghasilkan uang bagi perusahaan, jelas hal ini menandakan pergeseran yang signifikan bahwa acara berita-berita atau acara news-news sudah ditinggalkan oleh pemirsanya.

Sekarang bagaimana dengan insan pers, hanya itulah andalan anda bahwa suara anda didengar, seperti kita ketahui bahwa sebuah media massa di dalamnya terdiri dari sebagian kecil adalah karya pencari berita atau reporter sedangkan sebagian besar adalah merupakan karya yang lain yang bukan berita. **Kemudian apabila dilihat persentasenya, insan pers mempunyai porsi di dalam suatu media massa adalah hanya 2% saja dibandingkan seluruh isi suatu media massa, yang 98% isinya adalah iklan, acara film, acara variety shown. Yang 2% tersebut selama ini dijadikan andalan bagi semua orang di dunia pers dan juga dunia politik untuk merubah dan juga membawa masyarakat kepada tingkat yang diinginkan mereka di dalam konteks bahwa sesuatu berita di set untuk merubah masyarakat luas. Mereka beranggapan bahwa 2% adalah yang cukup untuk membuat masyarakat menjadi berubah dan juga mengikuti perubahan tersebut secara utuh yang kemudian diikuti dengan perubahan yang lain, perubahan akan membawa, diharapkan, bahwa perubahan bisa membuat segala sesuatunya berubah, selama ini mereka beranggapan demikian dan berhasil, memang berhasil tetapi hanya di dalam konteks ruang politik dan kebijakan pemerintah, di lain bidang 2% tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. 2% menjadi hal yang di highlight oleh mereka dan masyarakat yang akhirnya masyarakat meninggalkan yang dua persen disertai dengan meninggalkan pemerintah RI dan juga meninggalkan partai politik, contoh konkrit hal tersebut adalah ditinggalkannya acara-acara kampanye dan juga ditinggalkannya acara-acara pilkada, orang menyebutnya Golput. Semua orang sekarang sudah lelah dengan berita pemilu dan pilkada yang diset oleh media massa untuk diketengahkan dengan trik-trik akal bulus demi mengedepankan kelompok tertentu, kehidupan kita penuh dengan kepalsuan yang dibikin media masa tanpa disertai kemanfaatan baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat banyak, keuntungan hanya diperoleh oleh kelompok-kelompok tersebut,....mengapa kita harus terlibat bagi keuntungan kelompok-kelompok tersebut. Akhirnya hal tersebut yang terakhir disadari oleh masyarakat, dan akhirnya masyarakat meninggalkan agenda-agenda Pilkada dan Pemilu, dengar-dengar sebenarnya yang namanya golput (golongan putih) jumlahnya lebih dari 70% dari pemilih yang terdaftar, tapi dengan kelihaihan media massa yang didukung oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) maka angka golput tersebut menjadi sekitar 40%, entah benar entah tidak tetapi demikianlah rumornya, kenyataan mengatakan bahwa para pemilih di Pilkada dan Pemilu sudah tidak lagi menunjukkan keminatan untuk mengikuti agenda-agenda tersebut. Rasanya hal demikian kita dukung dimana kesadaran masyarakat terhadap yang realistik adalah harus dilakukan, soal urusan Negara ini yang tidak tentu arahnya ach itu mah bohong belaka. Kalau kita berandai-andai bahwa Pilkada dan Pemilu tidak ada yang berminat maksud saya pemilih tidak datang ke TPS-TPS untuk memilih, apakah Negara ini hancur, saya kira tidak, mereka para pejabat di Pemerintahan RI dan para partai politik akan**

memutar fikirannya untuk mengatasi demikian dan juga untuk mengatasi dengan cara membuat metode baru untuk membuat mereka terpilih dan halal sebagai penguasa baru di Pemerintahan RI. Saya yakin kalau tidak ada pemilih yang datang ke TPS maka roda Pemerintahan RI tetap berjalan, kalau tidak ada pemilih, pemerintah akan menciptakan sistem yang baru yang akan menjustifikasi keberadaan mereka, jadi tidak mengapa kita menjadi orang yang tidak ikut serta di dalam Pilkada atau Pemilu, karena mereka para pejabat pemerintah dan partai politik akan membuat aturan baru yang akan mengakomodir keinginan mereka dan mereka sukses dengan tujuannya sebagai penguasa di negeri ini melalui lembaga legislatif dan lembaga eksekutif tentunya. Bagi mereka yang penting adalah berkuasa, bagaimana caranya itu hanyalah metode saja, walaupun masyarakat tidak konsern lagi dengan kehadiran mereka, maka mereka beranggapan bahwa masyarakat tidak konsern karena masyarakat dianggap tidak menginginkan cara-cara yang telah ditentukan oleh mereka, saya yakin kalau Pilkada dan Pemilu tidak diminati dan kemudian tidak ada, maka Pemerintah RI dengan KPU-nya akan membuat sistem baru, yaitu mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mungkin dipilih oleh Undang-Undang baru atau UUD 1945 yang diamandemen lagi yang mungkin mekanismenya adalah diangkat langsung dari PNS yang telah bereselon atau cara lainnya. Jadi rasanya tidak apa kita tidak ikut serta di dalam Pilkada dan Pemilu karena semua urusan Negara selalu ada jalan keluarnya. Jadi tidaklah usah repot-repot dengan Pilkada atau Pemilu dan bersusah hati dengan trik-trik mereka terhadap kita, biarkan mereka dan jadikan itu hanya sebagai angin lalu saja. Kenapa kita harus berlaku demikian, karena Pilkada dan Pemilu adalah jalan bagi kelompok tertentu untuk dapat pekerjaan dan kita masyarakat adalah yang mengesahkannya lewat suara yang kita pilih, tidak lebih dari itu prinsip keinginan Pilkada dan Pemilu, adalah bullshit yang mengatakan bahwa Pilkada dan Pemilu adalah demi kepentingan Negara, buktinya Negara yang kacau dan sekarang ini terjadi, mereka tidak ikut mengentaskan kekacauan tersebut. Dimana ada semut di situ lah ada harapan, begitulah prinsip para partai politik di dalam konteks menginginkan jabatan atau menginginkan pekerjaan yang disahkan oleh masyarakat, masyarakat sendiri sudah susah payah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kenapa harus membantu orang lain kalau kesusahan, begitu prinsipnya. Kalau kita berperan langsung di dalam Pilkada dan Pemilu tentunya akan ikut membantu mereka di dalam meraih apa yang diinginkan bagi kelompoknya, dan setelah berhasil mereka menunjukkan keinginan untuk tidak dicampuri aktivitasnya dengan keinginan kita, mereka sekarang ini sudah kelihatan batang hidungnya sebagai kelompok yang tidak menginginkan anda ketika mereka sudah berhasil, makanya masyarakat sekarang yang menginginkan sesuatu setelah terbentuknya pemerintahan yang baru tersebut dibuat tidak dapat berbuat banyak melalui aktivitas-aktivitas mereka yang dipublikasikan melalui media massa yang isinya tidak lebih dari penipuan dan perampokan secara tidak langsung terhadap masyarakat. Penipuan dan perampokan yang didasarkan atas

justifikasi Undang-Undang Pemilu yang mengesampingkan peran dan keinginan rakyat. Undang-Undang Pemilu yang ditujukan dan berguna bagi kelompok partai politik, seharusnya ada poin atau pasal yang mengetengahkan peran rakyat di dalam pemilu tersebut dan juga finalisasi kalau suatu keadaan tidak terpenuhi yang menguntungkan rakyat Indonesia secara langsung.

Pers sebagai media bagi terwujudnya suatu keadaan ditinjau dari keinginan mereka yang besar yang melebihi keinginan sebuah institusi yang bergengsi sekalipun akan membawa dampak kepada terbentuknya suasana keadaan yang tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia, rakyat menjadi tidak respek dan juga tidak peduli terhadap apa yang dilakukan pemerintah RI, aturan menjadi permainan insan pers bersama-sama dengan partai politik. Partai politik memegang peranan sangat besar di dalam menentukan kebijakan suatu berita yang akan diketengahkan, bahkan partai politik tertentu katanya dengan terang-terangan berafiliasi atau bekerjasama dengan media massa, seharusnya media massa itu independen, tidak tergantung kepada pihak tertentu. Bisnis memang yang utama sekarang di dalam industri pers, politik adalah penyedia uangnya, uangnya berasal dari pemerintah RI, dan uang tersebut asalnya tentunya dari pajak rakyat. Seharusnya partai politik membiayai sendiri aktivitasnya di dalam kampanye dan sebagainya dan jangan menggunakan uang rakyat yang dipungut Pemerintah RI melalui pajak. Seharusnya pemerintah RI tegas di dalam hal keuangan, janganlah memberikan uang kepada peserta Pemilu, jadikan bahwa bonafiditas suatu partai sebagai syarat sebagai peserta Pemilu, kalau suatu partai politik tidak punya uang, maka janganlah dibantu, biarkan survive sendiri atau malah tutup, Pemerintah akan diuntungkan kalau bersikap demikian dimana partai politik yang ada tentunya yang paling bonafid, soal sumber daya manusianya Parpol yang katanya berkualitas sayang untuk dibuang dikarenakan ketidak-bonafiditasan suatu partai politik, itu hanya alasan saja, mereka bisa bermigrasi atau loncat ke partai politik lainnya dan menjadi anggota. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan ketidak-bonafiditasan suatu partai adalah bahwa partai melakukan koalisi partai, baik dua partai, tiga partai ataupun banyak partai, yang secara implisi dan eksplisit bahwa partai-partai yang berkoalisi adalah partai-partai yang tidak punya uang. Jelas bahwa kita sebenarnya bisa melihat arah dan masa depan bangsa ini dari bonafiditas suatu partai, biasanya partai yang miskin yang tidak punya uang mengandalkan uang pemerintahan yang trilyunan, isu mengatakan bahwa partai yang menang di Pemilu kemarin dapat suntikan dana dan tidak dipublikasikan yang jumlahnya trilyunan, jelas kalau Negara dan Pemerintah adalah ajang bagi memperkaya Partai Politik yang tentunya memperkaya para pengurus, padahal itu uang adalah uang rakyat yang dipungutin melalui pajak. Apakah anda sebagai seorang rakyat Indonesia rela diambil uang anda hanya untuk membiayai orang miskin yang diberi kesempatan oleh Pemerintah RI kemudian kaya karena uang anda, tentunya jawabannya adalah tidak. Isu juga menunjukkan bahwa sumber uang untuk mereka para partai politik adalah bukan hanya dari pajak yang diambil dari rakyat saja tetapi juga diambil dari perusahaan-perusahaan swasta dan juga

BUMN dan BUMD lewat mekanisme CSR (Corporate Social Responsibility) selain tentunya sumbangan-sumbangan yang bersifat memaksa lainnya dari perusahaan-perusahaan. Jelas ini adalah mekanisme suksesif yang dilakukan partai pemenang pemilu untuk memperkaya diri, seharusnya kalau anda ingin memperkaya diri janganlah pake uang rakyat dan juga uang CSR, nyari sendiri. Bagaimana anda nyari uang sendiri, tentunya adalah dengan usaha, ada peluang di Pemerintahan RI ketika anda berkuasa, maka setiap proyek pembangunan yang akan dilakukan Negara RI ambil alih semua kepengurusan dan pegawainya dan kerjakan oleh partai anda secara professional dan tentunya tanpa disertai dengan tindakan korupsi, pastilah anda akan mengeruk keuntungan, sedangkan rakyat dengan senang akan melihat bahwa anda adalah berguna bagi Negara dan Bangsa Indonesia, dan anda adalah bukan pencuri atau perampok. Jadi gunakan kesempatan anda di Pemerintahan RI ketika anda berkuasa dengan menggunakan kesempatan tersebut sebaik dan secerdas tadi, bukankah dengan hal yang demikian tidak bertentangan dengan siapapun? Jadinya anda adalah pahlawan yang mungkin suatu hari nanti dihargai dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat bahkan oleh anggota partai anda yang jujur. Pers sebagai suatu media yang mempunyai pola tersendiri di dalam mengungkap kejahatan dan kesewenang-wenangan akan mampu mendeteksi siapa saja yang korupsi, mudah sekali untuk mendeteksinya karena anda selalu berhubungan dengan mereka para Partai Politik untuk memata-matai aktivitas mereka, jadi kalau ada riak gelombang sedikitpun seorang insan pers dengan mudah mendeteksi aktivitas nyeleweng mereka. Pers bisa saja mungkin bekerjasama di dalam aktivitas politik dan juga aktivitas korupsi dari Pemerintah RI bersama-sama dengan Partai Politik pemenang. Jadi dapatlah dikatakan masuk akal sebagai background dunia industri yang mengedepankan kebohongan atau tipuan di dalam beritanya dikarenakan mereka para insan pers berusaha untuk menutupi aktivitas partnernya yang menguntungkan mereka insan pers di dalam penyelewengan dana atau uang rakyat yang ada di Pemerintah RI. Penyelewengan insan pers tidak terlepas dari peran Partai Politik yang ada di Pemerintah RI, mau ngak mau harus mengakui karena kedekatan mereka insan pers dengan kaum Partai Politik yang berkuasa. Jelas korelasi regresi yang berhubungan dengan aktivitas mereka yang membawa kepada suatu kesimpulan bahwa anda mungkin juga terlibat dan juga ikut mengeruk keuntungan dari keadaan yang terjadi dan dibentuk oleh partai politik dan insan pers.

Penyelewengan insan pers dengan industri pers tidak bisa dipisahkan dengan penyelewengan kaum partai politik yang berkuasa, tidak bisa dipisahkan titik. Hanya orang yang tidak mengerti yang tidak bisa melihat hubungan mereka. Mereka menjadi survive karena adanya partai politik, dan partai politik menjadi berhasil dalam aktivitas politiknya karena adanya mereka insan pers. Biang keladi dari ambruknya sistem ekonomi dan ambruknya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang telah diraih dulu patut dilayangkan atau ditujukan untuk disalahkan kepada partai politik dan insan pers serta industri pers. Makanya ketika keberhasilan reformasi mengedepan maka berbondong-

bondonglah orang untuk terjun ke dunia pers, dunia pers makin tidak terkontrol, kenapa demikian karena semua orang ingin uang rakyat di Pemerintah RI. Ada masanya ketika berita-berita tentang pesta poranya kaum insan pers setelah kemenangan reformasi, mereka insan pers dan industri pers yang didukung kaum partai politik merayakan keberhasilan mereka semua setelah menjatuhkan pemerintahan Soeharto, dengan atas nama kebebasan berbicara mereka merayakan keberhasilan mereka tersebut. Adakah diantara anda semua yang berfikir demikian, tentunya belum ada ya, hanya saya yang berfikir demikian karena saya terjun langsung pada waktu dulu jamannya demo-demo di tahun 1998 dan saya pada waktu itu mengenal dan bersinggungan dengan dunia pers tapi tidak dipublikasikan oleh mereka, tentunya dengan berbagai pertimbangan mereka yang tidak menginginkan dan menginginkan keadaan yang sesungguhnya tetapi keadaan yang diinginkan oleh mereka saja kaum insan pers dan industri pers juga tentunya kaum partai politik.

Partai politik memegang peranan yang besar di dalam membuat keputusan di dalam publikasi material di media pers secara langsung atau tidak langsung, juga tentunya melalui kebijakan Parpol yang tertuang di dalam Undang-Undang. Undang-Undang dibikin oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya adalah orang-orang dari Parpol. Mungkin dulu tidaklah kentara kalau Undang-Undang (UU) adalah buatan murni DPR semata, dikarenakan dulu anggota DPR terdiri dari Parpol, anggota ABRI, dan Utusan Daerah yang bukan orang parpol, sekarang DPR hanya terdiri dari parpol saja, anggota ABRI yang sebagai anggota DPR telah disingkirkan, juga hal tersebut terjadi juga kepada Utusan Daerah yang sekarang Utusan Daerah tersebut diganti menjadi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang isinya sekarang adalah orang-orang Parpol. Jelaslah sekarang ini yaitu jaman reformasi semua komponen di Pemerintahan dan Perwakilan Rakyat isinya adalah orang Parpol, .....beda dengan waktu dulu pada waktu jaman Soeharto yang fair dengan mengedepankan pertimbangan komponen masyarakat di Pemerintahan dan di Perwakilan Rakyat, .....haya kalau begini bagaimana anda menyangkalnya, bahwa kebobrokan di Pemerintahan dan tidak adanya pengawasan di Pemerintahan dikarenakan peran Parpol yang sudah menyentuh semua lini kehidupan. Jelas sekali sekarang ini tidak ada peluang orang sipil yang bukan anggota Parpol untuk berkiprah di Pemerintahan dan juga di Perwakilan Rakyat. Jelas kalau rakyat ditinggalkan oleh Parpol walaupun rakyat telah berjasa kepada Parpol ketika rakyat Indonesia memilih Parpol untuk duduk di Pemerintahan dan di Perwakilan rakyat. Jadi wajarlah kalau rakyat Indonesia sekarang antipati dengan Parpol dengan agenda Pilkada dan Pemilunya, tentunya ini dikarenakan rakyat Indonesia sudah tidak menginginkan kehadiran mereka di tengah-tengah rakyat Indonesia, banyak yang golput atau golongan putih dimana-mana, saya predikasikan di Pemilu yang setahun lagi akan terjadi hal yang demikian. Golput adalah pilihan yang tepat ketika kita rakyat Indonesia disingkirkan dari kehidupan bernegara dan bertata Negara. Rakyat sudah bukan bagian dari sistim pemerintahan di Indonesia dan sistim ketatanegaraan

Indonesia, rakyat bukanlah bagian dari dinamika politik Indonesia, rakyat Indonesia hanya dilibatkan ketika proses politik saja tanpa diberi penghargaan yang layak yaitu pembangunan yang diimpikan, rakyat menjadi bahan tertawaan dan bahan cercaan ketika rakyat berontak atas peran Parpol di dalam kehidupan masyarakat yang merugikan mereka, rakyat menjadi kambing hitam kekacauan di Pemerintahan dan di Perwakilan rakyat, dengan dalih keinginan rakyat, seseorang atau sekelompok wakil rakyat menyatakan bahwa segala kebijakan yang dibuat tentunya katanya didasarkan keinginan rakyat. Tetapi ketika rakyat berontak karena tidak suka dengan kebijakan Pemerintah dan Perwakilan Rakyat maka para wakil rakyat hanya mengatakan bahwa rakyat sudah bertindak anarkis. Rakyat menjadi serba salah dibuatnya, begitulah dunia politik yang diketengahkan para Partai Politik yang mereguk keuntungan dari proses demokrasi lewat Pilkada dan Pemilu yang didukung oleh pers dan industri pers, apa sebenarnya yang berusaha mereka raih dari keadaan tersebut, segalanya bermuara tentunya dari keadaan yang memaksa mereka para Partai Politik untuk mengelabui masyarakat dan mencuri secara langsung atau tidak langsung harta masyarakat yang ada di Pemerintah yaitu pajak. Pajak menjadi incaran mereka dan juga kekayaan bumi Indonesia yang mereka perjual-belikan. Satu lagi adalah dari sumber hutang luar negeri yang mereka para Partai Politik pinjam lewat Pemerintah RI yang kemudian dibagi-bagikan kepada mereka sendiri dimana pengawasan terhadap mekanisme hutang tersebut tidak ada, memang benar Indonesia tidak berhutang lagi ke donator di luar negeri seperti yang dikatankan di tv-tv, tetapi siapa tahu sebenarnya secara bilateral Indonesia melakukan pinjaman-pinjaman dan tidak dimunculkan di media masa. Adalah wajar kalau demikian ketika tidak ada di berita karena para Parpol Politik di Pemerintahan dan di Perwakilan Rakyat bekerja sama dengan insan pers dan industri pers untuk memperkaya diri sendiri. Begitulah skenario kebanyakan Partai Politik, bagaimanakah kita men-track keadaan sesungguhnya detail datanya, tentunya hanya yang kompeten menyelidikinya yang bisa men-track kejadian tersebut, sedangkan kita masyarakat hanya bisa melihat tanda-tanda yang mengarah ke arah demikian. Tengoklah kasus-kasus korupsi yang mengedepan dan muncul akhir-akhir ini yang terjadi di kalangan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan kita merasakan bahwa hal demikian sudah biasa terjadi, kenapa demikian tentunya karena peran pers-lah yang membuat kita merasa terbiasa dan itu merupakan metode pers untuk mengedepankan sesuatu yang tidak bermoral untuk dibiasakan dihadapan masyarakat sehingga masyarakat tidak aneh lagi dengan berita demikian dan akhirnya masyarakat bisa menerima keadaan bahwa orang-orang di Pemerintahan dan Perwakilan Rakyat melakukan korupsi di Negara RI. Anda sudah terbiasakan dengan berita korupsi tanpa bisa apa-apa, salah satu wartawan pernah menghubungi saya bahwa berita-berita korupsi di tv-tv dan di koran-koran katanya hanya untuk menggetawakan masyarakat yang geram dengan kasus-kasus korupsi yang marak di Indonesia,

tentunya kasus korupsi tersebut benar-benar terjadi. Konspirasi apa yang sedang dijalankan oleh media masa atau pers sekarang ini dengan metode demikian, jelas menurut saya hanya uang semata.

Akhirnya menurut saya, suatu nanti masyarakat akan sadar semua dan memilih untuk golput, akhirnya yang menentukan jumlah perolehan suara di Pemilu dan di Pilkada tentunya hanyalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPD (Komisi Pemilihan Daerah) bukannya rakyat Indonesia. Golput sudah menjadi trend sekarang karena masyarakat sudah memberikan kesempatan kepada para Parpol sepuluh tahun lamanya untuk mengatur Negara ini, sekarang saatnyalah mungkin bagi masyarakat untuk menagih janji para Parpol lewat media pers atau lewat media massa atas apa yang dijanjikan mereka, masyarakat menagih janji disertai dengan menghukum para parpol dan insan pers dan industri pers dengan cara membiarkan mereka para Parpol dan mengacuhkan para Parpol dengan cara tidak memilih tanda gambar para Parpol di Pemilu dan juga tidak memilih Presiden dan Wakil Presiden serta para kepala daerah di Pemilu dan Pilkada, atau dengan kata lain masyarakat menghukum disertai menagih janji para Parpol dengan cara menjadi golput (golongan putih). Untuk saat ini hanya itulah cara atau metode masyarakat yang realistis di dalam menghukum para Parpol dan menagih janji-janji para Parpol yang sudah berlangsung selama 10 tahun dan belum terwujud.

Pers sebagai suatu industri tentunya berperan di dalam arah dan kebijakan Negara di dalam konteks bahwa segala informasi dan komunikasi antara Negara dan rakyatnya ditentukan oleh dunia pers. Setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk rakyat Indonesia, yang memberitahu kepada rakyatsekarang ini adalah media masa atau pers. Masyarakat sekarang ini tidak dihiraukan oleh Pemerintah RI dengan segala kebijakan Pemerintah RI, Pemerintah RI yang mengeluarkan kebijakan kepada rakyat Indonesia sudah tidak lagi mengeluarkan kebijakan tersebut secara langsung diberitahukan kepada rakyat dan rakyat langsung menerimanya, Pemerintah RI lebih senang memberitahu kebijakan Pemerintah RI kepada rakyatnya melalui media massa, padahal media massa bukanlah alat suatu Pemerintah RI atau bukan alat resmi Negara RI, seharusnya kebijakan Pemerintah RI disampaikan kepada rakyat Indonesia melalui Camat, Kepala Desa dan RW serta RT, jelas mekanisme sistim Pemerintah RI tidak berjalan karena orang-orang di Pemerintah RI dan insane pers serta industri pers yang menginginkannya.

Jelas bahwa pers menguasai negeri ini dan powerful di dalam mengatur informasi yang harus sampai kepada rakyat Indonesia, kalau dunia pers tidak mau mencantumkan kebijakan Pemerintah RI dalam berita media massa tersebut, maka kebijakan Pemerintah Ri tidak akan sampai kepada rakyat Indonesia, jelas di sini terjadi pengaturan yang signifikan sebagai suatu pengaturan informasi yang akan diterima oleh rakyat Indonesia dan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan teroris. Saya beranggapan bahwa media massa atau insan pers adalah teroris bagi rakyat Indonesia di dalam

konteks diterima atau tidak diterimanya berita dari Pemerintah RI yang berupa kebijakan Pemerintah RI atau bahkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau keputusan Presiden.

Saya kira banyak kebijakan Pemerintah, baik itu Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan lainnya yang tidak sampai kepada rakyat Indonesia dikarenakan insan pers atau media massa tidak mau menyampaikan melalui media massanya tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah RI ini, jelas bahwa Pemerintah RI sekarang ini apabila demikian adalah Pemerintah RI yang bego yang hanya mengandalkan media pers atau media massa sebagai media untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan Pemerintah RI.

Patutlah diwaspadai bahwa pers yang demikian, dan masyarakat sekarang ini mungkin sedang menghukum baik secara langsung maupun tidak langsung, sekarang banyak industri pers yang ditutup. Tentunya penutupan ini dikarenakan bahwa pers sudah tidak logis di dalam berita-beritanya yang diketahui oleh rakyat Indonesia yang akhirnya rakyat Indonesia meninggalkan pers tersebut.

Jelas bahwa partai politik dengan koleganya yaitu pers dan industri pers sedang dihukum oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang sedang menunjukkan kekuasaannya terhadap mereka. Bagaimanakah pers menghadapi rakyat Indonesia, tentunya satu-satunya cara adalah dengan mem-beritakan berita yang benar-benar ada di masyarakat, metode ini dilakukan oleh pers dalam rantang waktu yang singkat, setelah rakyat Indonesia tenang, pers kembali lagi ke metode yang lama yaitu menipu dan membohongi rakyat Indonesia, sekarang ini fase demikian sedang terjadi di industri pers dengan mengedepankan berita-berita sepele yang memang ada di masyarakat sedang berita-berita besar yang bisa menguntungkan mereka atau menjatuhkan tidak dipublikasikan dan ditutupi untuk kemudian dipublikasi suatu saat sebagai berita yang sudah usang. Lihatlah news-news di setiap acara news, semuanya adalah hal-hal yang enteng, Negara ini kayaknya sudah aman dari intrik politik dan korupsi, mereka berusaha menutup-nutupi dengan segala cara dan ini dilakukan untuk menutupi peran pers itu sendiri di kasus-kasus tersebut. Industri pers lebih mengedepankan suasana pro dan kontra di dalam beritanya tanpa ada berita solusi atas permasalahan yang muncul, berita solusi biasanya diendapkan atau tidak dicantumkan, berita mengalir begitu saja dan hilang, kenapa demikian ini karena tentunya mungkin untuk menutupi kesalahan mereka di dalam berita-berita tersebut.

Pers menjadi senjata yang mematikan bagi terwujudnya cita-cita para parpol, pers identik dengan parpol sekarang ini di Indonesia. Sulit memang melihat untuk membedakan ke-independenan industri pers sekarang. Memang pers adalah ajang bagi pencarian nafkah hidup bagi Parpol dan industri pers mengerti bahwa hal demikian adalah peluang yang menguntungkan industri pers tersebut, yang akhirnya mereka bekerjasama baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Kalau anda tidak percaya sekarang ini lebih banyak berita tentang kegiatan Parpol dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain



Karya tulis ini bisa juga di download di alamat :

<http://www.geocities.com/NurdjamanSciBlog/INDUSTRIPERSDANREALITAS.pdf>)

Juli 2007

Penulis,

A. Nurdjaman

Alamat: Gg. Bpk Ohe Cimindi No.45 RT 03 RW 05 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir, Bandung  
40184 Indonesia